



Pentingnya Kesadaran Terhadap Implementasi Data Pribadi

Jakarta, 30 Januari 2024

Marco Alfian

BPSDM Kementerian Kominfo

Kasus Pelanggaran Data Pribadi di Eropa

Daftar perusahaan yang terkena sanksi PDP di Eropa (per Juli 2023)

Statistics : Highest Individual fines (Top 10)

The following statistics shows the highest individual fines imposed to date per data controller (only top 10 fines).

	Controller	Sector	Country	Fine [€]	Type of Violation	Date
1	Meta Platforms Ireland Limited	Media, Telecoms and Broadcasting	IRELAND	1200000000	Insufficient legal basis for data processing	2023-05-12
2	Amazon Europe Core S.&r.l.	Industry and Commerce	LUXEMBOURG	746000000	Non-compliance with general data processing principles	2021-07-16
3	Meta Platforms, Inc.	Media, Telecoms and Broadcasting	IRELAND	405000000	Non-compliance with general data processing principles	2022-09-05
4	Meta Platforms Ireland Limited	Media, Telecoms and Broadcasting	IRELAND	390000000	Non-compliance with general data processing principles	2023-01-04
5	Meta Platforms Ireland Limited	Media, Telecoms and Broadcasting	IRELAND	265000000	Insufficient technical and organisational measures to ensure information security	2022-11-25
6	WhatsApp Ireland Ltd.	Media, Telecoms and Broadcasting	IRELAND	225000000	Insufficient fulfilment of information obligations	2021-09-02
7	Google LLC	Media, Telecoms and Broadcasting	FRANCE	90000000	Insufficient legal basis for data processing	2021-12-31
8	Facebook Ireland Ltd.	Media, Telecoms and Broadcasting	FRANCE	60000000	Insufficient legal basis for data processing	2021-12-31
9	Google Ireland Ltd.	Media, Telecoms and Broadcasting	FRANCE	60000000	Insufficient legal basis for data processing	2021-12-31
10	Google LLC	Media, Telecoms and Broadcasting	FRANCE	50000000	Insufficient legal basis for data processing	2019-01-21

Sumber : <https://www.enforcementtracker.com/?insights>

Kasus Pelanggaran Data Pribadi di Eropa - META

Meta telah didenda untuk beberapa layanan mereka (yaitu Facebook, Instagram, WA) oleh beberapa Otoritas Perlindungan Data Pribadi di Eropa

Meta - Facebook



Usulan Sanksi : € 210 Million / Rp 3.5T

Meta - Instagram



Usulan Sanksi : € 180 Million / Rp 3T

Meta - Whatsapp



Usulan Sanksi : € 5.5 Million / Rp 90 B

Transparansi

- Informasi sehubungan dengan dasar hukum yang diandalkan oleh Meta Ireland **tidak diuraikan secara jelas kepada pengguna**
- **Pengguna tidak memiliki kejelasan yang memadai** tentang operasi pemrosesan apa yang dilakukan pada data pribadi mereka, untuk tujuan apa, dan dengan referensi yang mana dari dasar hukum.

Dasar Hukum

- Meta menggunakan **“force consent”** (pilih setuju atau hapus akun)
- **Meta mengubah penggunaan “Persetujuan” menjadi “Kewajiban Kontraktual”** sebagai dasar hukum untuk memroses data pribadi pengguna sehubungan dengan pengiriman layanan yang dipersonalisasi

Security Awareness Jakarta Barat

Kasus Pelanggaran Data Pribadi di Indonesia



<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/07/06/data-paspor-tersimpan-di-pusat-data-nasional-pemerintah-telusuri-34-juta-data-paspor-beredar-di-darkweb>



<https://katadata.co.id/lavinda/digital/6463643174676/ahli-it-pastikan-data-nasabah-bsi-bocor-dari-saldo-hingga-pinjaman>



<https://inet.detik.com/security/d-6826145/337-juta-data-dukcapil-bocor-pakar-data-yang-bocor-terlalu-lengkap>

Kasus Pelanggaran Data Pribadi di Indonesia - Ransomware

Mei 2023



Ransomware Lockbit 3.0 Klaim Lumpuhkan BSI dan Curi Data Pengguna

Pakar keamanan siber mengungkapkan Lockbit 3.0 adalah ransomware yang bertanggungjawab atas kelumpuhan sistem layanan BSI.

[cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com) - May 13, 2023

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230513093401-185-949046/ransomware-lockbit-30-klaim-lumpuhkan-bsi-dan-curi-data-pengguna>

Januari 2022



BI Akui Kena Serangan Ransomware, Ini Mitigasi yang Dijalankan

BI menyusun kebijakan standar dan pedoman ketahanan siber yang lebih ketat sehingga bisa mengatasi serangan ransomware.

[liputan6.com](https://www.liputan6.com) - Jan 10, 2022

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4865006/bi-akui-kena-serangan-ransomware-ini-mitigasi-yang-dijalankan>

Maret 2023



Geng Ransomware LockBit 3.0 Masukkan Mandiri Sekuritas dalam Daftar Korban. Ancam Publikasikan Data Akhir Maret

Mandiri Sekuritas belum memberikan komentar.

cyberthreat.id - Mar 11, 2023

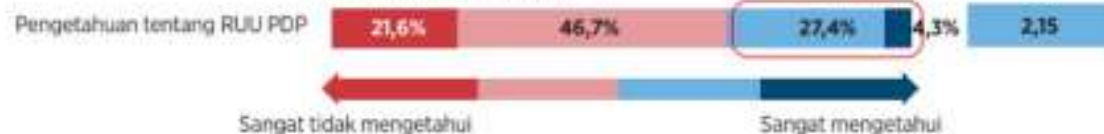
<https://cyberthreat.id/read/15467/Geng-Ransomware-LockBit-30-Masukkan-Mandiri-Sekuritas-dalam-Daftar-Korban-Ancam-Publikasikan-Data-Akhir-Maret>

Persepsi dan Harapan terhadap Perlindungan Data Pribadi

"Bagaimana tingkat pengetahuan anda tentang perlindungan data pribadi?". Mohon menjawab 1= Sangat tidak mengetahui, hingga 4= Sangat mengetahui [SA]
Basis: seluruh responden



"Bagaimana tingkat pengetahuan anda tentang RUU Pelindungan Data Pribadi?". Mohon menjawab 1= Sangat tidak mengetahui, hingga 4= Sangat mengetahui [SA]
Basis: seluruh responden



Menurut survei, perusahaan (79,2%) sudah mengetahui tentang perlindungan data pribadi secara umum. Hal ini juga ditunjukkan oleh skor tingkat pengetahuan yang mencapai 2,94 dari skala 4. Namun, ihwal Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP), hanya 31,8% perusahaan yang mengetahui (skor 2,15).

"Sebutkan alasan tidak membaca kebijakan privasi." [MA]
Basis: responden yang tidak mengetahui/membaca kebijakan privasi



"Apa saja bantuan yang dibutuhkan untuk mempermudah penerapan UU Pelindungan Data Pribadi di perusahaan anda?" [MA]



Sumber : Survei Nasional Persepsi Masyarakat dan Kesiapan Industri terhadap Pelindungan Data Pribadi

Undang Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

16 bab - 76 pasal

Bab I
Ketentuan Umum

Bab II
Asas

Bab III
Jenis Data Pribadi

Bab IV
Hak Subjek Data Pribadi

Bab V
Pemrosesan Data Pribadi

Bab VI
KEWAJIBAN PENGENDALI
DAN PROSESOR DATA
PRIBADI

Bab VII
Transfer
Data Pribadi

Bab VIII
Sanksi Administratif

Bab IX
Kelembagaan

Bab X
Kerjasama
Internasional

Bab XI
Parsitipasi
Masyarakat

Bab XII
Penyelesaian Sengketa
dan Hukum Acara

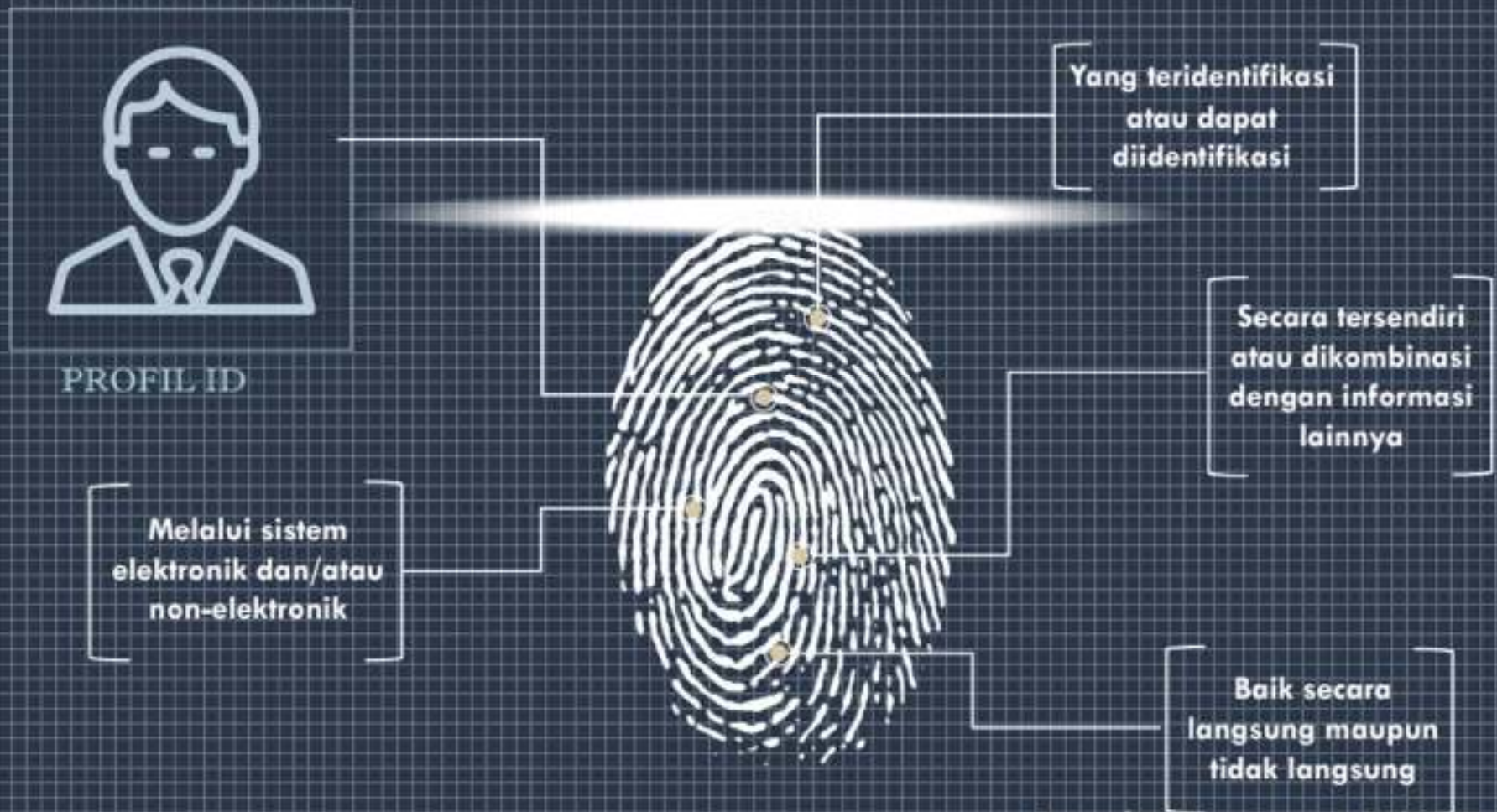
Bab XIII
Larangan dalam
Penggunaan Data Pribadi

Bab XIV
Ketentuan Pidana

Bab XV
Ketentuan Peralihan

Bab XVI
Ketentuan Penutup

Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan:



ROLE PDP



01 Lembaga Perlindungan Data Pribadi

Otoritas dalam Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi

02 Pengendali Data Pribadi

Setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi

03 Prosesor Data Pribadi

Setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.

04 Prosesor Data Pribadi

Orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi.

Security Awareness Jakarta Barat

Ruang Lingkup

berlaku untuk Setiap Orang, Badan Publik, dan Organisasi Internasional

↳ yang berada di wilayah hukum Negara Republik Indonesia

↳ di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia, yang memiliki akibat hukum :

- di wilayah hukum Negara Republik Indonesia; dan/atau
- bagi Subjek Data Pribadi warga negara Indonesia di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia

tidak berlaku untuk pemrosesan Data Pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga

ASAS PDP

- 01 Pelindungan
- 02 Kepastian Hukum
- 03 Kepentingan Umum
- 04 Kemanfaatan
- 05 Kehati-hatian
- 06 Keseimbangan
- 07 Pertanggung-jawaban
- 08 Kerahasiaan



Security Awareness Jakarta Barat

JENIS DATA PRIBADI

Data Pribadi Umum

nama lengkap

jenis kelamin

kewarganegaraan

agama

status perkawinan

data pribadi yg dikombinasikan utk mengidentifikasi seseorang



Data Pribadi Spesifik

data dan informasi kesehatan

data biometrik

data genetika

catatan kejahatan

data orang tua dan anak

data keuangan pribadi

data lainnya sesuai ketentuan

Lingkup Pemrosesan Data Pribadi



Prinsip PDP

01

Pengumpulan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan

02

Sesuai dengan tujuannya

03

Menjamin hak Subjek Data Pribadi

04

Akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawab

05

Melindungi keamanan Data Pribadi

06

Memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan PDP

07

Dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan

08

Bertanggung jawab dan dapat dibuktikan

Prinsip 1 : Pengumpulan Data Pribadi Terbatas dan Spesifik

Best Practice Terbatas :

- ✓ Mengumpulkan sesuai dengan tujuan

Best Practice Spesifik :

- ✓ Menetapkan tujuan pengumpulan data pribadi dan apa yang ingin dilakukan dengan data tersebut
- ✓ Menetapkan cara pemrosesan data pribadi
- ✓ Memastikan bahwa jika terdapat rencana untuk menggunakan atau mengungkapkan data pribadi untuk tujuan baru selain dari tujuan awal, pemrosesan atas tujuan baru tersebut menerapkan prinsip sah dan transparan.

Prinsip 1 : Pengumpulan Data Pribadi Sah Secara Hukum dan Transparan

Best Practice Sah Secara Hukum :

- ✓ Mengidentifikasi **dasar pemrosesan yang sah** yang sesuai
- ✓ Tidak melakukan apa pun yang secara umum melanggar hukum dengan data pribadi.

Best Practice Transparan :

- ✓ Menginformasikan kegiatan pemrosesan data pribadi

Dasar Pemrosesan yang sah

- **Persetujuan** yang sah dari pemilik Data Pribadi
- Memenuhi kewajiban **perjanjian**
- Memenuhi **kewajiban hukum dari pengendali Data Pribadi**
- Memenuhi perlindungan **kepentingan vital subjek Data Pribadi**
- Pelaksanaan **kewenangan, kewajiban pengendali Data Pribadi** dalam pelayanan publik berdasarkan UU
- Memenuhi kepentingan yang sah lainnya.

Sebelum Pemrosesan !

Dasar Pemrosesan yang Sah – Persetujuan

- ✓ **Persetujuan tertulis atau terekam**
- ✓ **Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan Informasi:**
 - ☞ **Legalitas dari pemrosesan Data Pribadi**
 - ☞ **Tujuan**
 - ☞ **Jenis dan relevansi Data Pribadi**
 - ☞ **Jangka waktu retensi dokumen yang memuat data pribadi**
 - ☞ **Jangka waktu pemrosesan Data Pribadi**
 - ☞ **Hak**
- ✓ **Hak untuk menarik persetujuan**



Dasar Pemrosesan yang Sah – Persetujuan

Pemrosesan data pribadi anak wajib mendapat persetujuan dari orang tua anak dan/ atau wali anak.



McDonald's
**PARENT OR GUARDIAN
CONSENT FORM**

Full Name of Parent or Guardian: _____

Relationship: Parent Guardian

Street Address: _____

Mobile Phone Number: _____

Home Phone Number: _____

Work Phone Number: _____

Address: _____

City: _____ State: _____

I give consent for _____ to attend an in-person or take-away McDonald's restaurant on _____ and, should they be successful, to be employed at this restaurant (enter the location of the restaurant) _____

Your signature: _____

Today's date: _____

I read the entire form and understand the information about my child's or dependent's employment at McDonald's and I agree to the conditions of the form.

Note: If you do not fill this form, you will still receive an email confirming your employment application. However, you will not receive any further communication.



Google

Login orang tua

Orang tua harus membantu shincan mengelola Akun Google miliknya sampai dia berusia 13 (atau persyaratan usia yang berlaku di negara Anda).

Alamat email atau nomor telepon orang tua _____

Masukkan akun yang akan Anda gunakan untuk mengelola akun shincan.

Berikutnya



Dasar Pemrosesan yang Sah – Perjanjian

Ketentuan Perjanjian atau Kontrak :

- ✓ Kontrak memuat hak dan kewajiban antara subjek data dan pengendali (dan/atau prosesor)
- ✓ Terdapat persetujuan eksplisit



Dasar Pemrosesan yang Sah – Kewajiban Hukum bagi Pengendali

Registrasi data pelanggan seluler

Peraturan Menteri Koinfo No 5 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Terdapat frasa kewajiban

Data pribadi apa saja yang wajib diproses

Pasal 154

Penyelenggara Jasa Telekomunikasi **wajib** menggunakan identitas Pelanggan Jasa Telekomunikasi Prabayar untuk registrasi berupa:

- bagi Warga Negara Indonesia:
 - Nomor MSISDN atau nomor Pelanggan** Jasa Telekomunikasi yang digunakan; dan
 - Data Kependudukan berupa:
 - NIK dan Nomor Kartu Keluarga; atau
 - NIK dan Data Kependudukan biometrik, termasuk namun tidak terbatas pada teknologi pengenalan wajah (*face recognition*), teknologi pengenalan sidik jari (*finger print recognition*) dan teknologi pengenalan iris mata (*iris recognition*).
- bagi Warga Negara Asing:
 - Nomor MSISDN atau nomor Pelanggan** Jasa Telekomunikasi yang digunakan; dan
 - Paspor, Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).**

Dasar Pemrosesan yang Sah - Kewenangan dan Kewajiban Pengendali

Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013



Pasal 9

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUA/Kec.

Prinsip 3 : Menjamin Hak Subjek Data



Hak Informasi

Mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan pemrosesan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi.



Hak Update

melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidaktepatan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.



Hak Akses

Mendapatkan akses dan memperhalus akses Data Pribadi tentang dirinya.



Hak Hapus

menghapus pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan Data Pribadi tentang dirinya.



Hak Tarik Persetujuan

menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi.



Hak Keberatan

mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis.



Hak Tunda

menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi secara sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.



Hak Ganti Rugi

menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadinyanya.



Hak Portabilitas dan Interoperabilitas

menggunakan dan mengirimkan Data Pribadi tentang dirinya ke Pengendali Data Pribadi lainnya.

Prinsip 3 : Menjamin Hak Subjek Data

Pengecualian Hak Subjek Data Pribadi

- Kepentingan pertahanan dan keamanan nasional
- Kepentingan proses penegakan hukum
- Kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara
- Kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara
- Kepentingan statistik dan penelitian ilmiah

Prinsip 4 : Akurat, Lengkap, Tidak Menyesatkan, Mutakhir

Best Practice Checklist :

- ✓ Memiliki proses yang sesuai untuk memeriksa keakuratan data yang dikumpulkan dan mencatat sumber data tersebut.
- ✓ Memenuhi hak individu untuk memperbaiki
- ✓ Tidak perlu melakukan langkah apapun jika subjek data meyakini bahwa datanya akurat jika pemrosesan tersebut tidak membutuhkan akurasi yang tinggi
- ✓ Menandai informasi tidak akurat yang tidak di update oleh subjek data pribadi
- ✓ Pembaruan data 3 x 24 Jam
- ✓ Memberitahukan hasil pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi

Prinsip 5 : Melindungi Keamanan Data Pribadi

- Kerahasiaan Data
- Ketersediaan Data
- Keutuhan Data



- Pengumpulan data pribadi
- Penggunaan dan pengungkapan data pribadi
- Kualitas data pribadi
- Hak Subjek Data

Prinsip 5 : Melindungi Keamanan Data Pribadi

Formulir Laporan Dugaan Kebocoran Data Pribadi

- I. Detail kebocoran data pribadi
 - detail kejadian insiden kebocoran (5H+1W)
 - kategori data pribadi
 - jumlah pemilik data
 - kategori pemilik data
 - dampak pemilik data
 - aspek CIA yang terdampak
 - dampak bagi pengendali
 - waktu pemulihan
 - internal awareness
 - langkah pengamanan sebelum insiden
- II. Perbaikan yang dilakukan
 - tindakan perbaikan
 - pemberitahuan
- III. Profil pengendali



Prinsip 6 : Memberitahukan Kegagalan Pelindungan Data Pribadi



Kepada Pengguna Setia RedDoorz,

Kami sadar akan kemampuan yang Anda berikan kepada kami untuk melindungi dan menjaga informasi pribadi Anda. Jadi mengapa ini kami

menyebut ada insiden yang melibatkan lembaga kami, atau tidak, satu saja sistem kami yang berisi data pribadi pelanggan. Insiden ini terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Januari.

Kami percaya bahwa ada informasi data yang dibocorkan akibat serangan ini, seperti nama pelanggan, alamat email, nomor telepon, alamat serta data lain yang berkaitan dengan informasi pribadi yang berkaitan dengan data yang dibocorkan yang berkaitan dengan informasi pribadi yang berkaitan dengan data yang dibocorkan.

Insiden ini kami telah menanggapi dengan cepat untuk memastikan bahwa informasi yang dibocorkan tidak menimbulkan risiko yang signifikan. Kami telah melakukan pembaruan terhadap sistem IT dan keamanan kami. Sejak ini kami telah menanggapi semua laporan terkait insiden ini dengan cepat, serta mengaktifkan pemantauan ber tingkat dua untuk memastikan. Kami juga meninjau semua parameter keamanan dan telah membantu serta berupaya jika terjadi serangan lain lagi. Kami juga bersedia untuk mengambil langkah legal untuk pemulihan pribadi data di setiap negara berdasarkan RedDoorz yang terkena dampak insiden ini.

Kami memahami insiden ini menimbulkan banyak pertanyaan dan Anda, dan oleh karena itu kami membuat sebuah email khusus yang dapat Anda hubungi guys mengenai pertanyaan pribadi berkaitan ini lebih lanjut. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda ke privacy@reddoorz.com.

Walaupun password atau RedDoorz Anda dibocorkan, kami menyarankan agar Anda dapat mengganti password Anda untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Kami juga menyarankan agar Anda tidak menggunakan password yang sama dengan platform digital lainnya.

Kami sadar penuh bahwa pengamanan ini melindungi Anda, dan kami merasa sangat penting bagi RedDoorz, dan kami telah menerapkan langkah-langkah pengamanan untuk memastikan semua data pengguna kami tetap aman dan kami juga telah mengambil tindakan untuk meminimalkan risiko insiden serupa terjadi kembali di masa depan.


Kanwar Ashish Saxena
CEO & Co-Founder RedDoorz

Prinsip 7 : Penghapusan dan Pemusnahan Data Pribadi

Best Practice Checklist :

- ✓ Memiliki kebijakan retensi
- ✓ Memiliki prosedur penanganan permintaan penghapusan dari subjek data
- ✓ Memiliki prosedur penghapusan secara aman

Berlaku atas :

- ✓ Data pribadi tidak lagi diperlukan untuk tujuan pemrosesan
- ✓ Permintaan subjek data
- ✓ Subjek data menarik persetujuan mereka
- ✓ Penolakan subjek data atas pemrosesan yang berdasarkan atas kepentingan yang sah lainnya
- ✓ memproses data pribadi secara tidak sah
- ✓ Data telah melalui masa retensi

Prinsip 8 : Bertanggung Jawab dan Dapat Dibuktikan Secara Jelas



Dalam dokumen kontrak

- Identifikasi pihak-pihak
- Tujuan
- Jenis data pribadi
- Kategori subjek data
- Jangka waktu
- Kewajiban masing-masing pihak
- Ganti Rugi

Prinsip 8 : Bertanggung Jawab dan Dapat Dibuktikan Secara Jelas

Penilaian Dampak PDP

Pengendali Data Pribadi wajib melakukan penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dalam hal pemrosesan Data Pribadi memiliki **potensi risiko tinggi** terhadap Subjek Data Pribadi, meliputi

- pengambilan keputusan secara otomatis
- pemrosesan atas Data Pribadi yang bersifat spesifik
- pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar
- pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan evaluasi, penskoran, atau pemantauan yang sistematis
- pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan pencocokan atau penggabungan sekelompok data
- penggunaan teknologi baru dalam pemrosesan Data Pribadi
- pemrosesan Data Pribadi yang membatasi pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi.



Sanksi Administratif

UU PDP

- Peringatan tertulis
- Penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi
- Penghapusan/pemusnahan Data Pribadi
- Denda administratif

PP PSTE

- Teguran tertulis
- Denda administratif
- Penghentian sementara
- Pemutusan Akses
- Dikeluarkan dari daftar

**Denda administratif paling tinggi 2% pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran*

Larangan dan Ketentuan Pidana

memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi

**Pidana Penjara maks. 5 tahun
dan/atau denda maks. Rp 5Miliar**

mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya

**Pidana Penjara maks. 4 tahun
dan/atau denda maks. Rp 4Miliar**

menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya

**Pidana Penjara maks. 5 tahun
dan/atau denda maks. Rp 5Miliar**

membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

**Pidana Penjara maks. 6 tahun
dan/atau denda maks. Rp 6Miliar**



Partisipasi Masyarakat



Pendidikan dan Pelatihan



Advokasi

Sosialisasi



Pengawasan



Ketentuan Peralihan

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pengendali Data Pribadi, Prosesor Data Pribadi, dan pihak lain yang terkait dengan pemrosesan Data Pribadi, wajib menyesuaikan dengan ketentuan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang ini **paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pelindungan Data Pribadi, dinyatakan **masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan** dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini

**Pagi pagi makan tempe,
Masaknya bareng si mama
Jangan abai dengan PDP,
Ayo kawal implementasinya bersama.**

Terima Kasih